MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

Diperbaiki pada tanggal 23 Juni 2025

SURAT TUGAS
Nomor : 320/DJMT.1/ST.KP7.1/VI/2025

Menimbang : Bahwa dengan adanya pengaturan baru mengenai perubahan konsep Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan usaha, serta paradigma baru mengenai tindakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyebabkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas, maka diperlukan kesiapan dari pada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa lingkungan hidup melalui peningkatan pengetahuan hukum lingkungan hidup.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 300/DJMT/SK.DL1. 10/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Marta Satria Putra, S.H., M.H./ 198203012007041001, Pembina (IV/a), Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Ditbinganismintun;
2. Retno Ariyani, S.H., M.H./ 198403072008052002, Pembina (IV/a), Hakim Yustisial;
3. Agus Abdur Rahman, S.H., M.H./ 198208022009041002, Pembina (IV/a), Hakim Yustisial.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang bertempat di Novotel Semarang, Jalan Pemuda No. 123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132 pada tanggal 6 sd. 8 Juli 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SODIKIN

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara